

MENUJU KEBERHASILAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PONOROGO

TITI RAPINI¹⁾, UMI FARIDA²⁾, SETYO ADJI³⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: titi.rapini@gmail.com¹⁾

umifarida33@yahoo.com¹⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kondisi Usaha Kecil Menengah setelah dilakukannya pembinaan oleh Dinas Indagkop Kabupaten Ponorogo. Sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektifitas pembinaan yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, ada 3 jenis pelatihan dari tahun 2010 sampai 2013. Namun tidak diketahui bidang usahanya, maupun nama perusahaannya. Sampel 50 peserta dengan berbagai tahun dan jenis pelatihan. Hasilnya 52% (26 UKM) peserta memiliki usaha, 24% belum, dan 24% tidak ditemukan alamatnya. Sedangkan yang memiliki usaha, tidak memiliki data keuangan secara tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM belum memiliki laporan keuangan baku, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangannya. Dari 26 yang sudah memiliki usaha, terdiri dari 10 dari Industri Makanan Tradisional terdiri atas :Sate Ayam, Dodol, Kopi Bubuk, dan Gula Aren. Industri Roti dan Kue 6 UKM. Industri Kerajinan 10 yang terdiri dari Batik, Reog, dan Kerajinan Kulit. Dari 26 perusahaan sampel, dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu yang pertama usaha yang statis, artinya meskipun telah memperoleh bekal pelatihan dan pembinaan, pola pikir dan pengelolaan usahanya tidak berubah yang berakibat pada tidak berkembangnya usaha tersebut. Hal ini selain disebabkan oleh kurangnya kemauan, usaha merupakan usaha sampingan, ketergantungan pada jaringan pemasaran yang sudah ada serta keterbatasan SDM. Sedang yang kedua adalah perusahaan berkembang yang didorong oleh adanya kemauan atau openmind, sehingga usaha ini berkembang baik dari sisi desain, model maupun cara pengelolaan usahanya. Selain itu ditunjang dengan tingkat pendidikan /pengalaman, serta adanya figur yang dapat menggerakkan kelompok usaha.

Kata Kunci: Model Pembinaan, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian dan hasil-hasil pembangunan. Sehingga UKM merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem perekonomian. Namun perkembangannya hingga kini masih tertinggal jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Sementara tipe usaha kecil ini terbukti benar-benar kuat serta tahan banting pada krisis ekonomi.

Berdasarkan survei BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Mengkop &UKM) usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualannya(turn over) setahun kurang dari 1 milyar),pada tahun 2000 meliputi 99,9% dari total Usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp 1 milyar

dan Rp 50 milyar) meliputi hanya 0,14% dari jumlah total usaha. Ini berarti potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 % dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Melihat peranan UKM dalam perekonomian ditinjau dari segi jumlah usaha, maupun dari segi penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan lingkungan yang mendukung serta keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian pengembangan investasi perlu berlangsung berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumber daya nasional dan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha terutama UKM dan koperasi perlu didorong untuk memperluas kesempatan dan pemerataan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi, sehingga terwujud sistem perekonomian kerakyatan.

Prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat bergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM. Di Kabupaten Ponorogo dalam rangka menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan dengan beberapa program antara lain : pertama Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan tentang UKM. Kedua, program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan AMT, dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan UKM. Serta Program monitoring maupun evaluasi, dan sosialisasi lainnya.

Potensi usaha kecil di Kabupaten Ponorogo menurut data Indakop tahun 2003 tercatat 62 unit usaha . Sebagaimana umumnya usaha kecil, kelemahan serta hambatan dalam pengelolaan usahanya baik menyangkut internal maupun eksternal (Titi Rapini, 2004, Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) adalah :

- Tidak melakukan analisis kelayakan usaha, pasar, ataupun perputaran kas.
- Tidak memiliki perencanaan jangka panjang, system pembukuan yang memadai, maupun alat-alat kegiatan manajerial lainnya yang umumnya diperlukan oleh suatu bisnis yang profit oriented
- Kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam potensi
- Kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu, sehingga sering tidak konsisten dengan ketentuan pesanan
- Tingginya Labou Turnover
- Banyak Biaya diluar pengendalian
- Pembagian kerja tidak profesional sehingga terjadi pekerjaan yang melimpah
- Kesulitan modal kerja dan tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja
- Persediaan terlalu banyak pada produk yang kurang laku/salah
- Mis-manajemen dan ketidakpedulian pengelola terhadap prinsip-prinsip manajerial
- Sumber-sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik

Strategi dalam menumbuhkan dan mengembangkan UKM melalui pembinaan dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan antara lain pertama, Program Penciptaan Iklim usaha Usaha

Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tentang UKM, fasilitasi pengembangan UKM. Kedua, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan AMT (Achievement Motivasi Training), Pelatihan manajemen pengelolaan UKM, Sosialisasi HaKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Ketiga, Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM, Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, Monitoring, evaluasi dan pelaporan sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan permodalan dan pemasaran (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut beberapa hambatan yang dialami oleh Indagkop antara lain SDM pengusaha, ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman, keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan informasi . Meskipun disisi lain beberapa Faktor pendukung berupa ketersediaan dana, jalinan kerjasama dengan instansi lain, ketersediaan sarana dan prasarana (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Untuk itu penting kiranya dievaluasi hasil pembinaan yang dilakukan dengan mengukur hasil kinerja keuangan UKM pasca memperoleh pembinaan. Oleh karena untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan suatu perusahaan perlu diketahui perkembangan keadaan finansilnya dengan mengadakan interpretasi atau analisa terhadap data finansil dari perusahaan yang bersangkutan. Data finansil atau informasi finansil suatu perusahaan akan tercermin didalam laporan keuangan (laporan finansil).

Dengan mengetahui keadaan dan perkembangan finansil perusahaan akan dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai diwaktu-waktu yang lalu dan waktu berjalan. Dengan mengadakan analisa data finansil tahun-tahun yang lalu, akan diketahui kelemahan atau hambatan yang lebih kongkrit. Dengan demikian dapat dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan model dan pola pembinaan yang lebih sesuai untuk diaplikasikan oleh UKM dimasa yang akan datang, sehingga dapat membuat Laporan Keuangan dengan mudah. Dengan demikian diharapkan perkembangan UKM dapat tumbuh sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah memiliki dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia (kumpulan artikel ekonomi-blogspotcom/2009/06) :

1. Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil Penjualan tahunan maksimal Rp.1.000.000.000 (1 milyar) dan memiliki kekayaan bersih,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200.000.000,00
2. Definisi menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya,yaitu:

- Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
- Industri kecil dengan pekerja 5-15 orang
- Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
- Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

UKM merupakan kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan Daerah. Oleh karena UMKM memiliki posisi penting bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial (Abdullah Abidin).

Keberadaan UKM yang demikian sebagai bagian dari keseluruhan entitas Nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi yang beragam di Indonesia. Namun masih banyak masalah yang dihadapi oleh UKM tersebut. Sebagaimana hasil Penelitian tentang UKM di daerah Bantul Yogyakarta, diketahui bahwa beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM antara lain 1) pemasaran, 2) modal dan pendanaan, 3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, 4) pemakaian bahan baku, 5) peralatan produksi, 6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, 7) rencana pengembangan usaha, 8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal (Jaka Sriyana, 2010).

Kendala ataupun hambatan yang dialami UKM juga ditegaskan oleh Prihatin Lumbanarja (2011) bahwa dalam pembangunan dan pengembangan UKM banyak strategi dan metode yang telah dilakukan baik langsung maupun tidak langsung...Kendala utama yang dihadapi adalah a) Terbatasnya kemampuan SDM UKM untuk menyerap dan mengaplikasikan kebijakan yang sudah ada, b) Kecenderungan iklim politik dan ekonomi yang tidak kondusif juga mempengaruhi upaya pengembangan UKM, c) Relatif rendahnya tingkat kepedulian pembina dan instansi terkait terhadap upaya pengembangan UKM masing-masing unit kerja, d) Kondisi perdagangan bebas (arus globalisasi) menuntut UKM tidak hanya sekedar tetap eksis bertahan akan tetapi dituntut mampu meningkatkan pelayanan dan produktivitas usahanya sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi, e) Adanya kesenjangan struktural yang cukup lebar antara UKM dengan usaha besar dalam perekonomian nasional, karena ketidak seimbangan laju pertumbuhan keduanya, f) Masih ditemukan tumpang tindih pelaksanaan peraturan daerah dan pusat, g) Masih lemahnya daya saing UKM baik ditingkat lokal, regional, nasional, maupun global, h) Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UKM sehingga kemampuan untuk melakukan inovasi dan diversifikasi usaha sangat rendah.

Di kabupaten Ponorogo sendiri hambatan UKM dari hasil penelitian Ratna Trisuma Dewi ditemukan antara lain : SDM pengusaha, ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman, keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan informasi . Meskipun disisi lain beberapa Faktor pendukung berupa ketersediaan dana, jalinan kerjasama dengan instansi lain, ketersediaan sarana dan prasarana (Ratna Trisuma Dewi, 2009).

Berkaitan dengan berbagai kendala yang dihadapi UKM maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasinya. Hal ini diperlukan dukungan semua pihak, baik dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dinas/instansi terkait dilingkungan pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi. Disamping itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UKM (Jaka Sriyana, 2010).

Dalam rangka pengembangan UKM tersebut pemerintah melalui Kementrian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menekankan kebijakan pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finansial maupun non finansial. Hal ini dilakukan dengan menyusun program operasional berupa kebijakan-kebijakan diantaranya : a) Program penumbuhan iklim usaha yang kondusif, b) Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif, c) Program pembinaan kewirausahaan yang berkeunggulan kompetitif, d) Program peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM secara terpadu (Prihatin Lumbanraja, 2011).

Sedangkan menurut Wisber Wiryanto (2012) bahwa untuk mendorong tumbuhnya UKM maka pemerintah daerah terkait perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui pengembangan sumber daya manusia UKM, peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit, peningkatan produktivitas dan optimalisasi koordinasi.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Ponorogo. Melalui Indagkop telah melaksanakan pembinaan meliputi : Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tentang UKM, fasilitasi pengembangan UKM. Kedua, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan AMT (Achievement Motivasi Training), Pelatihan manajemen pengelolaan UKM, Sosialisasi HaKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Ketiga, Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM, Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, Monitoring, evaluasi dan pelaporan sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan permodalan dan pemasaran (Ratna Trisuma Dewi, 2009).

Dari hasil penelitian Ahmad Rifa'i, diketahui dari 30 responden UKM yang dibina oleh PT Jasa Bina Marga melalui program Kemitraan periode 2009/2010 pada 2 bulan setelah pelatihan dan pinjaman tidak ada peningkatan yang diinginkan dari 5 variabel yang diamati (sumberdaya manusia, manajemen produksi, administrasi keuangan, pemasaran, motivasi dan rencana usaha). Namun hasil mulai nampak peningkatan pada priode 2 sampai ke 5 supervisi (bulan ke 3 sampai ke 7) pengamatan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini berada Di Kabupaten Ponorogo. Mengingat dari hasil penelitian tahap I peserta pelatihan hanya 52% yang memiliki usaha, maka untuk sampel mengembangkan

model Pengelolaan Keuangan akan diambil dari UKM dari berbagai sentra industri. Data yang diperlukan adalah data primer maupun sekunder. Data Primer meliputi data-data hambatan dan kendala yang dialami oleh UKM, data keuangan perusahaan/UKM. Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan panduan dari kuisioner (interview) pada obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder, memanfaatkan dokumen –dokumen yang ada pada UKM yang diteliti. Selain itu juga diperlukan pendataan dengan melakukan pengamatan, pencatatan terhadap aset-aset yang dimiliki UKM guna membantu didalam memperkiraan aset yang dimiliki. Sedangkan perkiraan nilai aset bisa didasarkan pada informasi pengusaha ataupun pihak lain.

HASIL PENELITIAN

1. Peserta Pelatihan dan Jenis Pelatihan

Dari hasil penelitian tahun ke 1, tidak diperoleh informasi jenis usaha maupun, nama perusahaannya. Kebersertaan mencantumkan nama peserta serta alamat tinggal. Total peserta pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2010 hingga 2013, ada 1020 orang, terdiri atas 650 merupakan peserta pelatihan Kewirausahaan (63,7%), 195 peserta (19,15%) pelatihan yang berbasis ketrampilan/kerajinan, 150 peserta (14,7%) pelatihan yang diarahkan bagi masyarakat industri tembakau, dan 25 peserta (2,45%) dari koperasi, yaitu Koperasi Wanita. Frekuensi pelatihan tertinggi diselenggarakan tahun 2012 sebanyak 8 kali pelatihan, dimana 7 kali merupakan pelatihan kewirausahaan sedangkan satu kali berbasis ketrampilan. Disusul pada tahun 2011 sebanyak 7 kali pelatihan, yang kesemuanya diarahkan pada pelatihan yang berbasis pada ketrampilan. Sedangkan di tahun 2010 dan 2013 masing-masing 5 kali pelatihan dimana mayoritas diarahkan pada pelatihan kewirausahaan.

Dari jumlah peserta tersebut diambil 50 peserta dari berbagai tahun pelatihan. Dari hasil pengumpulan data diperoleh informasi bahwa 26 peserta telah memiliki usaha atau 52%. Sedangkan 24% peserta pelatihan (12 orang) sampai saat penelitian dilakukan belum memiliki usaha. Adapun 24% lainnya alamat yang tertera pada data pelatihan tidak ditemukan, atau telah berpindah alamat (sebanyak 12 peserta). Namun dari 26 peserta yang telah memiliki usaha, belum memiliki catatan pembukuan secara baik. Sehingga belum diperoleh informasi tentang jumlah asset maupun tingkat aktivitas operasional perusahaan. Sehingga belum dapat diukur tingkat kinerja keuangannya.

2. Perkembangan Usaha Pasca Pelatihan

Pada tahun kedua, dari hasil temuan diatas maka diambil sampel 26 UKM dari berbagai jenis industri. Dari Industri Makanan Tradisional diperoleh 10 UKM, terdiri atas 3 usaha sate ayam, 3 usaha jenang dodol, 2 kopi bubuk, sedangkan janggolan dan gula aren masing-masing satu usaha. Untuk Industri Makanan dan Kue terdapat 6 sampel, yang terdiri dari 5 usaha roti dan kue dan 1 usaha pembuatan Yogurt. Sedangkan Industri yang berbasis Kerajinan ada 10

sampel, yang terdiri dari 4 industri kerajinan Reog, 2 industri Sangkar Burung, 2 kerajinan batik, dan 2 kerajinan kulit. Dari ke 26 UKM diatas dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu

1. Meningkatkan/Berkembang

Dari 26 UKM yang mengalami perkembangan ada 14 perusahaan, yaitu 2 industri batik, 6 dari indutri makanan dan kue, dan 6 dari industri makanan tradisional. Pengertian berkembang dalam hal ini tidak hanya dilihat dari peningkatan penjualan, namun juga dari sisi manajerial, desain maupun diversifikasi produk, maupun jaringan pemasarannya.

2. Statis

Artinya usaha ini berjalan ditempat. Ada 12 sampel usaha yang berada pada kondisi ini, yaitu 4 dari industri reog, 2 industri sangkar burung, 2 industri kerajinan kulit, 4 dari jenis makanan tradisional.

3. Pembahasan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong berkembangnya Usaha:

a. Adanya kemauan dari para pelaku usaha untuk berkembang

Setelah adanya pelatihan kewirausahaan , yang mana materinya terkait pemasaran, manajemen usaha hal ini diaplikasikan dalam usaha tersebut. Industri Roti dan Kue Kalimantan mengembangkan diri setiapkali diberi pelatihan oleh indagkop. Bertambahnya jenis-jenis kue. Diversifikasi jenis dodol yang dikembangkan oleh Teguh Raharja dan Jenang Murni, merupakan contoh adanya kemauan dari pengusaha tersebut untuk berkembang. Kesadaran akan pentingnya perluasan jaringan pemasaran disadari benar oleh para pelaku usaha , sehingga KUB Rizki yang memproduksi Janggolan berupaya memperluas jaringan pemasarannya ke kota Ponorogo khususnya dan juga luar kota. Penerapan Teknis Proses produksi dan Kemasan, juga dilakukan setelah dilatih oleh Indagkop Jatim.

b. Tingkat Pendidikan dan Pengalaman

Faktor pendidikan juga menjadi alasan kemauan para pelaku usaha ini mengembangkan diri. Perusahaan Batik Lesoeng, mampu menciptakan desain-desain baru, selain adanya stimulan dari Indagkop, juga latar belakang pendidikan yang bersangkutan pendidikan seni.

Sedangkan faktor pengalaman , menjadi pendorong dari perusahaan Roti D'rent untuk dapat melakukan inovasi varian kue yang dihasilkan. Jenang Murni, mampu mengembangkan diri lebih cepat karena latar belakang pengalaman pemiliknya bekerja di Jenang Dodol Kudus.

Sehingga pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Indagkop lebih mudah untuk diterima dan diaplikasikan dalam pengelolaan usahanya.

c. Adanya Motor Penggerak dalam kelompok Usaha

Adanya figur yang ada dalam kelompok industri, yang berperan didalam menggerakkan kelompok usahanya, juga menjadi faktor pendorong keberhasilan UKM dalam

mengembangkan usahanya. Sebagaimana yang ada di industri Roti dan Kue Kalimantan, Sragi, Ponorogo. Disana terdapat kelompok industri yang semuanya memproduksi Roti dan Kue. Kelompok ini aktif mengadakan pelatihan yang langsung diselenggarakan oleh Indagkop, maupun bekerjasama dengan perusahaan tepung (bahan Baku kue). Dalam kelompok, perkembangan macam-macam kue dipraktekkan. Aktifitas kelompok ini tidak lepas dari peran Bu Sulasmi, yang gigih menggerakkan ibu2 dilingkungannya untuk memproduksi roti dan kue.

Begitu pula dengan figur p Bambang yang dapat menyatukan para petani Janggelan, yang awalnya hanya mejual Janggelan dalam bentuk bahan mentah. Kemudian meningkatkan nilai tambah produk janggelan dengan membuatnya menjadi minuman siap saji. Meskipun awalnya hanya dengan menggunakan alat-alat tradisional. Dengan adanya pembinaan serta bantuan alat produksi yang lebih modern oleh indagkop , maka produk inipun telah layak untuk disandingkan dengan produk minuman siap saji lainnya. Faktor yang menghambat perkembangan UKM :

1) Tidak adanya keinginan untuk Berkembang

Para pelaku usaha Gula Aren di Ngebel, meskipun telah memperoleh pelatihan pembuatan produk gula aren yang lebih baik, mereka tetap berpegang pada model atau kemasan yang lama. Mereka menganggap hal tersebut tidak masalah, karena para tengkulak tetap membeli produk mereka. Begitu pula terkait keinginan untuk meningkatkan jumlah produksinya, belum nampak. Sebagaimana ketika ditanyakan untuk meperluas lahan untuk penanaman pohon aren, mereka belum berpikir kesana. Apa yang ada sekarang dianggap sudah mencukupi kebutuhan mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh para pengrajin reog.

2) Usaha Tersebut merupakan Usaha Sampingan

Usaha Kopi Bubuk di Ngebel dan Mlarak, mengelola usaha mereka sebagai usaha sampingan semata. Meskipun, secara kemasan produk Kopi Bubuk Telaga Sari Ngebel, telah mengaplikasikan pembinaan yang dilakukan oleh indagkop. Namun karena usaha ini hanya merupakan usaha sampingan, maka kontinyuitas produksinya belum terlaksana. Hal ini berakibat pada terbatasnya wilayah pemasaran yang dilayaninya, yang tentu berdampak pada perkembangan usaha ini yang seolah jalan ditempat.

3) Ketergantungan Pemasaran pada Jaringan yang sudah ada

Kuatnya peran perantara pemasaran pada industri Sangkar Burung di Ketonggo, Bungkal mengakibatkan pada terbatasnya varian desain yang dihasilkan oleh para pengrajin. Walaupun pihak Indagkop telah mengadakan pembinaan kepada mereka terkait desain maupun jaringan pemasaran. Para pengrajin ini hanya membuat desain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para distributor ini. Bahkan para pelaku usaha ini tidak berani untuk memperluas wilayah pemasarannya dengan membuka jaringan pemasaran baru. Sehingga jaringan pemasaran digunakan hanya satu.

4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Hal ini dialami oleh para pengrajin kulit , baik yang ada di Sukorejo maupun di Sambit. Keterbatasan tenaga kerja yang mau bekerja pada industri ini mengakibatkan kurang terpenuhinya permintaan pasar. Hal ini dikarenakan, pekerjaan pengrajin kulit dianggap kurang menjajikan. Sehingga usaha inipun perkembangannya kurang menggembirakan.

KESIMPULAN

1. Ada 3 jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh Indagkop yaitu pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan yang berbasis ketrampilan, dan pelatihan yang ditujukan untuk Koperasi
2. Ada dua kategori UKM setelah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan Dari Indagkop, yaitu UKM yang berkembang, dan yang ke dua UKM yang statis
3. Faktor-faktor yang mendorong UKM dapat berkembang dikarenakan : Adanya kemauan dari pelaku usaha, Tingkat ppendidikan dan pengalaman yang dimiliki pelaku usaha, adanya figur yang dapat menjadi motor penggerak kelompok usaha.
4. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat perkembangan UKM antara lain : tidak adanya kemauan dari pelaku usaha untuk berkembang, Usaha tersebut hanya sebagai usaha sampingan, Adanya ketergantungan pada jaringan pemasaran yang sudah ada, serta keterbatan SDM yang tertarik untuk bekerja di usaha tersebut.

Saran-saran

1. Perlu dilakukan pelatihan ataupun pembinaan yang difokuskan pada pemberian motivasi.
2. Perlu dilakukan pelatihan yang lebih bersifat teknis yang dilakukan diluar waktu produksi (jam kerja)
3. Dilakukan pemetaan jenis pelatihan yang sudah diikuti oleh UKM
4. Perlu adanya pendampingan dan pemantauan pasca pelatihan ataupun pembinaan
5. Perlu peran serta pihak-pihak diluar pemerintah untuk melakukan pembinaan UKM, karena jumlah UKM yang sangat banyak sehingga tidak terjangkau oleh pemerintah seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abidin, Penelitian "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah."
- Ahmad Rifa'i, 2013, Penelitian "Peran Pembinaan Manajemen Usaha Terhadap Kemajuan Bisnis UKM (Studi kasus Mitra Binaan PT Jasa Marga Persero)"
- Asis Riat Winanto dan Titi Rapini, 2013, Penelitian " Peran Lembaga Keuangan Informal Terhadap Pemberdayaan Kelompok Sektor Informal"
- Indagkop Kabupaten Ponorogo, "Produk Unggulan Dinas Indagkop", MP4.
- Jaka Sriyana, 2010, Penelitian "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul", disampaikan dalam Simposium Nasional Menuju Purworejo Dinamis Dan Kreatif.
- Kumpulan artikel Ekonomi "UKM Dan Pembangunan Bekelanjutan" kumpulan- Artikel -ekonomi-
blogspot.com/2009/06/ukm-dan-ekonomi-berkelanjutan.html
- Malayu S P Hasibuan, 2003, "Manajemen Sumber Daya Manusia", PT Bumi Aksara, Jakarta
- Prihatin Lumbanraja, 2011, " Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat Dan Lingkungan Hidup",
jurnal Ekonomi, Volume 14, No:2, April 2011
- Ratna Trisuma Dewi, 2009, Skripsi "Strategi Dalam Menumbuhkan Dan Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pembinaan Oleh dinas Industri, Perdagangan, Koperasi, Dan Penanaman Modal di Kabupaten Ponorogo.
- Suad Husnan, 2000, "Manajemen Keuangan", BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Titi Rapini, 2004, seminar Tri Wulan "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pembinaan Usaha Kecil, Fakultas Ekonomi Univ Muhammadiyah Ponorogo
- UPTD Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah, 2006 "Materi Diklat Berbasis Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia ", Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah, Malang
- Wisber Wiryanto, 2012, judul makalah " Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015", disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka pada Juli 2012